

PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI SUMATERA UTARA

Teguh Wahyono dan Djafar M

ABSTRAK

Paper yang berjudul Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Perkebunan Kelapa Sawit bertujuan: a) mengetahui peranan kelapa sawit pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan sektor fiskal; b) mengetahui peranan kelapa sawit pada pengembangan wilayah; and c) mengetahui sumbangan hasil perkebunan kelapa sawit terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Sampai akhir 2003 areal kelapa sawit 760.387 ha, keperluan tenaga kerja untuk kegiatan kerja di kebun adalah 35 orang setiap 100 ha, maka jumlah yang dapat diserap adalah 304.155 orang. Jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) mencapai 85 unit dengan kapasitas olah total 3.400 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Dalam setiap PKS yang berkapasitas olah 30 ton TBS per jam diperlukan tenaga kerja sebanyak 136 orang, maka untuk seluruh PKS diperlukan 15.400 orang. Tenaga kerja dalam jumlah banyak lagi akan dapat diserap oleh industri hilir yang berbahan baku kelapa sawit.

Di wilayah Sumatera Utara, pembangunan perkebunan juga meliputi pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti: jalan, jembatan, gedung sekolah, tempat ibadah dan sarana lainnya. Untuk selanjutnya diikuti dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, misalnya pusat perdagangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, olah raga, hiburan dan lain-lain

Nilai produksi kelapa sawit di Sumatera Utara pada tahun 2003 menurut harga berlaku adalah Rp10,15 triliun, dengan kontribusi terhadap perkebunan, pertanian dan PDRB seluruh sektor berturut-turut adalah 87%, 37% dan 11%. Kontribusi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 3,8 milyar, Pajak Penghasilan (PPH) Rp. 1,57 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 890,4 milyar dan Pajak Ekspor (PE) Rp. 154,9 milyar.

*Kata kunci: Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*), ekonomi, sosial, pembangunan*

ABSTRACT

Paper entitled Economy Development through Oil Palm Plantation in North Sumatra was done in North Sumatra Province. Objective of the study is to: a) understand the role of oil palm on labor absorption; b) earnings tax and regional development; and c) understand the role of oil palm on gross regional domestic product (GRDP).

In the end 2003 area of oil palm 760,387ha, and the labor need for the working standard in plantation is 35 people every 100 ha, hence the sum of the labor can be

absorbed is 304,155 people. The number of oil mill reach 85 unit with the total capacities of processing is 3,400 ton fresh fruit bunches (FFB) per hour. Each oil mill with capacity of 30 ton of FFB per hour processing capacity needed labor as much 136 people, hence to all mills will absorb 15,400 people. Labor in large number will be able to be employed by downstream industry which raw material of oil palm.

Plantation development also cover the development of physical infrastructure, for instances: road, bridge, school building, mosque & church etc. Furthermore, it is followed by the development of economic activity and social, for example commerce center, financial institution, institute of education, center of health, sport, entertainment and others.

In regional GRDP of oil palm in 2003 according to current price is Rp10.15 trillion, with the contribution to plantation, agriculture and GRDP entire sector is 87%, 37% and 11% respectively. The contribution of oil palm plantation in North Sumatra was Land tax (PBB) Rp. 3.8 billion, earnings tax (PPh) Rp. 1.57 trillion, value added tax (PPN) Rp. 660 billion and export tax (PE) Rp. 154.9 billion.

Key words: Oil palm (Elaeis guineensis), economic, social, development

PENDAHULUAN

Peranan Subsektor Perkebunan

Dalam upaya menggali potensi perkebunan, pemerintah Indonesia menetapkan arah, dan program pembangunan perkebunan. Menurut arahan yang ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) 1993, industri pertanian (termasuk perkebunan) dan industri lain yang terkait, terus didorong perkembangannya sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Semuanya diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pada umumnya (3).

Sebagai tindak lanjut dari arah yang ditetapkan tersebut pemerintah melaksanakan program pembangunan perkebunan, selain ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi juga pemerataan pembangunan (7). Maka dari itu pola yang digunakan untuk melaksanakan

program pembangunan perkebunan selain perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS) juga yang berorientasi pada pengembangan perkebunan rakyat. Contoh pola pengembangan perkebunan rakyat misalnya proyek pengembangan tanaman ekspor (PRPTE), perusahaan inti rakyat (PIR), pola Koperasi dan lain-lain (8).

Subsektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Secara umum produksi perkebunan besar lebih besar dibandingkan dengan produksi perkebunan rakyat kecuali produksi kopi, kemenyan, kemiri dan jahe yang tidak dikelola oleh perkebunan besar. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan lebih dititik beratkan pada perkebunan besar tanpa mengabaikan perkebunan rakyat. Pada tahun 2002, hampir semua komoditi perkebunan rakyat di Sumatera utara mengalami pe-

ningkatan, kecuali tanaman tebu dan jahe.

Usaha perkebunan besar di Sumatera Utara dilaksanakan melalui dua macam badan usaha, yaitu perusahaan perkebunan besar yang dikelola negara (PTPN) dan perusahaan perkebunan besar yang dikelola oleh swasta (PBS). Komoditi perkebunan besar di Sumatera Utara yang utama adalah karet, kelapa sawit, teh, kakao, tebu dan tembakau.

Tanaman kelapa sawit yang menjadi primadona perkebunan di Sumatera Utara mengalami peningkatan produksi, baik yang diusahakan rakyat maupun oleh negara. Produksi kelapa sawit yang terdiri dari Tandan Buah Segar (TBS), Crude Palm Oil (CPO), dan inti sawit berturut-turut 3.570 ribu ton, 743 ribu ton dan 187 ribu ton pada tahun 1998. Produksi tersebut terus meningkat (kecuali inti sawit) hingga mencapai 3.678 ribu ton, 782 ribu ton dan 187 ribu ton pada tahun 2002.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan ekonomi suatu bangsa di suatu negara atau warga masyarakat di daerah; indikator lainnya yaitu pemerataan, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja. Sampai dengan akhir 2002, berdasar harga konstan tahun 1993, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 4,04%, yaitu dari Rp. 24,91 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp. 25,92 triliun pada 2002 (Tabel 1).

Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari tahun 2001 (3,72%), tetapi masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2000 (4,83%); apalagi jika dibandingkan dengan tahun 1997 (5,70%) akan jauh lebih rendah.

Tabel 1. Perkembangan beberapa indikator ekonomi Sumatera Utara 1999-2002

No.	Indikator	Satuan	1999	2000	2001	2002
1.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	2,59	4,83	3,72	4,04
2.	PDRB harga berlaku	Triliun Rp	61,96	67,66	77,80	86,74
3.	PDRB harga konstan 1993	Triliun Rp	22,91	24,02	24,91	25,92
4.	PDRB per kapita harga berlaku	Juta Rp	5,48	5,88	6,68	7,36
5.	PDRB per kapita harga konstan 93	Juta Rp	2,02	2,09	2,14	2,20
6.	Neraca perdagangan luar negeri	Milyar US\$	1,91	1,66	1,43	2,07
	- Ekspor	Milyar US\$	2,61	2,44	2,29	2,89
	- Impor	Milyar US\$	0,70	0,78	0,86	0,82

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara (2003) dalam Zen (2004)

Sementara itu, berdasarkan harga berlaku, PDRB Sumatera Utara meningkat dari 77,80 triliun rupiah pada 2001 menjadi 86,74 triliun rupiah pada tahun 2002. Meningkatnya PDRB ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat secara tidak langsung dari besarnya PDRB perkapita. Sampai dengan akhir 2002, PDRB per kapita pada harga konstan 1993 tercatat Rp. 2,20 juta, selalu lebih tinggi dibanding tahun 1999 sampai dengan 2001. Sedangkan PDRB perkapita pada harga berlaku tahun 2002 tercatat sebesar Rp. 7,36 juta lebih tinggi dibandingkan tahun 2001 yang sebesar Rp. 6,68 juta, juga dibanding masa-masa sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2002 yang sebesar 4,04%, ternyata lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 3,66%. Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi bahwa pemerintah daerah Sumatera Utara telah lebih baik secara rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia dalam hal peningkatan kehidupan ekonomi.

Peranan Sektor Pertanian pada Perekonomian Sumatera Utara

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Sumatera Utara sangat penting, terutama dalam hal kemandirian pemenuhan kebutuhan primer dan penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian mencapai 55,56%; di kawasan pedesaan angka ini lebih tinggi lagi yaitu mencapai 79,49%. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor utama penyumbang nilai tambah terbesar di propinsi Sumatera Utara (10).

Sejak 1999, sektor pertanian kembali menjadi *leading sector* di Sumatera Utara, kontribusi yang cukup besar ini terutama didorong oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan yang merupakan sumber kehidupan ekonomi yang bersifat tradisional di Sumatera Utara. Pada tahun 2002, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar 29,33%, lebih rendah daripada tahun 2001 yang besarnya 30,23% (Tabel 2).

Ditinjau dari segi kontribusi subsektor, maka perkebunan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pertanian. Pada tahun 2002, subsektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 10,04 trilyun (39,78%). Walaupun terjadi penurunan dalam persentase dibanding tahun 2001 yang sebesar 40,16%, tetapi kontribusi subsektor ini terhadap sektor pertanian masih paling tinggi dibandingkan subsektor lainnya (Tabel 3). Tingginya kontribusi subsektor perkebunan ini oleh karena perkebunan Sumatera Utara memang sudah mulai diusahakan secara komersial sejak zaman kolonial.

Tabel 2. Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan 1993 dan kontribusi seluruh sektor di Sumatera Utara tahun 2001-2003

No.	Sektor	Kontribusi (%)			Pertumbuhan (%)		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
1.	Pertanian	31.72	30.23	29.33	3.31	0,05	0,18
2.	Pertambangan & penggalian	1.38	1.65	1.76	6.47	7,49	2,35
3.	Industri pengolahan	21.49	26.33	25.83	4.39	7,26	7,17
4.	Listrik, gas & air bersih	1.58	1.22	1.49	7.28	8,60	6,81
5.	Bangunan	4.27	4.19	4.36	4.01	4,26	5,65
6.	Perdagangan, hotel & restoran	17.18	19.01	18.49	3.67	4,98	7,07
7.	Pengangkutan & komunikasi	8.41	5.61	29.33	6.80	6,16	6,53
8.	Keuangan, sewa & jasa prshn	6.89	4.29	4.55	1.91	6,08	4,12
9.	Jasa-jasa	7.09	7.47	8.08	1.77	3,21	4,21
	Total (%)	100.00	100.00	100.00			
	Rata-rata (%)				4.83	4.04	4.44

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara (2003) dalam Zen (2004)

Tabel 3. PDRB sektor pertanian di Sumatera Utara menurut subsektor tahun 1998 – 2002 (milyar rupiah)

No.	Subsektor	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Tanaman bahan makan	4.948,53 (38,36)*	6.898,70 (36,36)	7.227,44 (35,99)	8.213,99 (35,14)	8.932,76 (35,39)
2.	Perkebunan	4.947,08 (38,35)	7.883,81 (41,55)	7.904,96 (39,36)	9.389,28 (40,16)	10.042,58 (39,78)
3.	Peternakan	1.393,67 (10,80)	1.816,84 (9,58)	1.958,79 (9,75)	2.203,94 (9,43)	2.387,96 (9,46)
4.	Perikanan	1.044,56 (8,10)	1.584,19 (8,35)	2.062,86 (10,27)	2.453,38 (10,49)	2.732,40 (10,82)
5.	Kehutanan	566,66 (4,39)	789,23 (4,16)	930,17 (4,63)	1.116,83 (4,78)	1.148,23 (4,55)
	Pertanian	12.900,48 (100,00)	18.972,77 (100,00)	20.084,21 (100,00)	23.377,42 (100,00)	25.243,93 (100,00)

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara (2003) dalam Zen (2004)

Keterangan: *angka dalam kurung adalah presentase terhadap pertanian

PERANAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Penyerapan Tenaga Kerja

Selain sistem perkebunan besar, pengembangan dengan pola perkebunan yang melibatkan rakyat juga ditempuh, terutama ditujukan untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan. Dalam konsepsi pola ini, didasarkan adanya perbedaan yang sangat besar antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat dipandang dari segi teknologi, permodalan, produktivitas, kualitas produk, efisiensi usaha serta akses pasarnya, yaitu bahwa perkebunan besar merupakan pihak yang lebih unggul. Dengan kata lain, menurut teori *dualisme ekonomi*, perkebunan besar merupakan sektor modern sedangkan perkebunan rakyat merupakan sektor tradisional. Melalui pola ini diupayakan penggabungan aspek-aspek keunggulan perkebunan besar dengan aspek-aspek kelebihan perkebunan rakyat, yaitu, keuletan, ketangguhan dan stabilitas yang tinggi.

Selama ini perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun di Sumatera Utara sampai akhir 2003 meliputi areal sekitar 760.387 ha. Dengan asumsi bahwa keperluan tenaga kerja untuk kegiatan kerja di tingkat kebun (industri hulu) adalah 4 orang setiap 10 ha, maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 304.155 orang.

Sementara itu berkenaan dengan keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), bahwa sampai dengan 2003 jumlahnya mencapai 85 unit dengan

kapasitas olah total diperkirakan mencapai 3.400 ton TBS per jam. Jika setiap PKS dengan kapasitas olah 30 ton TBS per jam diperlukan tenaga kerja sebanyak 136 orang (untuk dua shift), maka untuk seluruh PKS di Sumatera Utara telah menyerap tenaga kerja sekitar 15.400 orang. Tenaga kerja dalam jumlah banyak lagi akan dapat diserap oleh industri hilir yang berbahan baku kelapa sawit (3).

Maka dari itu industri kelapa sawit (mulai hulu sampai hilir) dapat menyerap sangat banyak tenaga kerja, berarti sektor ini merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah sosial. Dengan demikian melalui subsektor ini juga telah tercapai sasaran pemerataan yaitu untuk memperoleh kesempatan kerja.

Berkenaan dengan misi pengusaha perkebunan sebagai salah satu pelaku ekonomi, telah ditetapkan memiliki dua misi sekaligus, yaitu misi ekonomi untuk memperoleh laba perusahaan (*profit oriented*), dan misi sosial untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat (*social oriented*).

Pengembangan Wilayah

Pembangunan perkebunan utamanya ditujukan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri (melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganeka ragam jenis, pemanfaatan lahan transmigrasi, lahan kering dan gambut), memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam sistem agrobisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui kerja sama

yang saling menguntungkan antara produsen bahan baku dengan industri, didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit idealnya direncanakan pelaksanaannya di kawasan baru, yang relatif masih belum diusahakan oleh manusia secara teratur. Dengan kata lain, kawasan tersebut masih merupakan kawasan yang belum berkembang dan jauh dari pusat keramaian. Dengan demikian harapan selanjutnya adalah usaha perkebunan tersebut akan dapat mengembangkan ekonomi wilayah dengan cara menimbulkan usaha-usaha baru yang terkait dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat perkebunan. Pengembangan ekonomi wilayah juga diharapkan dapat tercapai karena perkebunan kelapa sawit banyak yang dikembangkan di wilayah marginal yang selama ini kurang produktif (6).

Oleh karena itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit di suatu kawasan biasanya terdiri dari dua komponen pembangunan fisik, yakni pengembangan kebun itu sendiri dan pembangunan komponen prasarana dan sarana seperti: jalan, jembatan, gedung sekolah, tempat ibadah dan sarana lainnya. Untuk selanjutnya akan diikuti dengan pembangunan-pembangunan sarana lainnya oleh masyarakat sekitar proyek, dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup masyarakat perkebunan dan masyarakat pada umumnya. Dalam kawasan ini biasanya muncul perkotaan baru pusat kegiatan ekonomi dan sosial, yang lengkap dengan fasilitas perbelanjaan (toko, warung dan lain-

lain), pusat perdagangan (pasar), pusat kesehatan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, olah raga, hiburan dan lain-lain. Kondisi demikian akan dapat menciptakan rasa kerasan pada diri para pekerja perkebunan baik yang berasal dari penduduk lokal maupun pendatang.

Studi terhadap beberapa kasus, memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) mampu memperbaiki kesejahteraan ekonomi petani peserta. Pola ini telah berhasil mengembangkan perkebunan di luar Sumatera. Mengingat sifat dari usaha perkebunan yang banyak menyerap tenaga kerja, dan karena usaha perkebunan itu dikembangkan melalui perkebunan rakyat, maka keberhasilan perkebunan itu akan mengangkat kehidupan ekonomi para petani (6).

Pengalaman lain pada beberapa kasus, juga memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah tidak akan menimbulkan gejolak sosial yang berarti bilamana peserta proyek sebagian berasal dari penduduk lokal yang memang secara turun temurun telah mengusahakan tanah yang dijadikan sebagai areal pengembangan perkebunan kelapa sawit. Komposisi antara pendatang dan penduduk lokal yang ideal adalah masing-masing 50%. Bila di lokasi pengembangan memang kurang penduduknya maka komposisi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan komposisi ini, maka pembagian kavling juga harus disiasati sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembauran antara pendatang dengan penduduk lokal.

Kontribusi terhadap PDRB

Kelapa sawit diusahakan secara komersial pada tahun 1911 yaitu di kebun Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara, dan masa-masa selanjutnya terus berkembang. Faktor utama yang mendukung berkembangnya industri perkebunan pada masa itu antara lain adalah kondisi iklim (fisik) yang sesuai, lahan dan tenaga kerja yang melimpah dengan harga murah.

Sejak nasionalisasi perkebunan bekas perusahaan Belanda pada sekitar tahun 1957 sampai sekarang, produksi kelapa sawit di Sumatera Utara khususnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena intensifikasi dan ekstensifikasi.

Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada tahun 2003 adalah 760.387 ha, dengan produksi CPO 2.494.253 ton dan inti sawit (PK) 623.563 ton. Jika produksi CPO dan PK dikonversi dalam nilai rupiah dengan harga rata-rata CPO Rp3.000/kg (pasar lokal) dan Rp. 4.140/kg (untuk pasar ekspor) dan harga rata-rata PK Rp. 2.000/kg, maka nilai CPO tersebut dapat adalah Rp. 8,9 triliun dan nilai PK adalah Rp. 1,25 triliun; sehingga nilai produksi seluruhnya Rp. 10,15 triliun.

Sementara itu nilai PDRB sektor pertanian secara keseluruhan menurut data dari BPS Sumatera Utara pada 2002 adalah Rp. 25,24 triliun dan PDRB subsektor perkebunan adalah Rp. 10,04 triliun. Jika PDRB sektor pertanian pada 2003 tumbuh menjadi Rp. 27,77 triliun (asumsi pertumbuhan 10%) dan PDRB subsektor perkebunan tumbuh menjadi Rp. 11,66 triliun, maka kontribusi kelapa

sawit terhadap PDRB perkebunan dan pertanian masing-masing adalah 87% dan 37%. Jika kontribusi pertanian terhadap PDRB seluruh sektor adalah sekitar 30%, maka kontribusi kelapa sawit adalah 11%. Kontribusi ini tergolong tinggi, lagi pula usaha perkebunan ini merupakan sumber pendapatan non migas yang dapat diperbarui (*renewable*).

Kontribusi terhadap Pajak

Dipandang dari segi pendapatan pemerintah melalui pajak, maka dari usaha industri perkebunan kelapa sawit, paling tidak dapat digali 4 macam sumber pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Ekspor (PE).

Jika pada tahun 2003, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara adalah 760.387 ha, dan PBB per tahun adalah Rp. 5000/ha/tahun, maka kontribusinya terhadap PBB adalah Rp. 3,8 milyar/tahun.

Kontribusi usaha terhadap PPh dapat diperhitungkan melalui asumsi bahwa proporsi laba perusahaan adalah 65% dari penerimaan dan PPh 30% dari laba. Maka dari itu potensi PPh yang dapat disumbangkan kepada negara pada tahun 2003 adalah Rp. 1,98 triliun.

Selanjutnya kontribusi usaha terhadap PPN, dapat diperhitungkan bahwa penerimaan penjualan CPO dan PK adalah Rp. 10,15 triliun dan PPN proporsinya 10% dari laba. Maka dari itu potensi PPN yang dapat disumbangkan kepada negara pada tahun 2003 adalah Rp. 660 milyar.

Selama ini penerimaan devisa dari subsektor perkebunan sebagian besar diperoleh melalui ekspor, bahkan pada masa kolonial Belanda hasil ekspor komoditi perkebunan ini merupakan tulang punggung perekonomian negara. Estimasi volume ekspor CPO oleh seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada tahun 2003 adalah sebesar 1,25 juta ton, dan harga rata-rata US\$ 450/ton, maka nilai ekspor dari CPO ini akan mencapai nilai US\$ 561,2 juta. Jika ketetapan pajak ekspor yang diberlakukan adalah 3%, maka sumbangan pajak ekspor CPO pada tahun 2003 terhadap negara akan mencapai US\$ 16,8 juta atau sekitar Rp. 154,9 milyar.

KESIMPULAN

Sumbangan hasil usaha perkebunan dan industri kelapa sawit terhadap perekonomian regional Sumatera Utara sangat signifikan. Hal ini terlihat dari proporsi sumbangannya yang cukup besar terhadap PDRB, selain itu juga sebagai sumber pendapatan potensial kepada pemerintah melalui pemungutan pajak. Kemudian keberadaan perusahaan perkebunan juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja, dan juga dapat membawa misi sosial sebagai wahana pembangunan wilayah (*agent of development*) untuk mencapai sasaran pemerataan.

Paket teknologi telah banyak dikembangkan, baik di tingkat hulu maupun hilir. Berbagai teknologi telah dapat diaplikasikan (*adopted*) oleh pelaku usaha terutama tingkat hulu,

misalnya penggunaan sarana produksi yang berkualitas tinggi, pelaksanaan kultur teknis benar dan tepat. Adopsi teknologi industri hilir masih sangat terbatas, mengingat pemilik modal masih bersikap hati-hati terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi, maka mereka masih melakukan studi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. BOEKE, J. H. 1983. *The Interest of the Voiceless Far East (Prakapitalisme di Asia, alih bahasa D. Projosiswoyo)*. Sinar Harapan. Jakarta.
2. BPS. 2004. *Statistik Kelapa Sawit 1998-2003*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
3. DITJENBUN. 2003. *Statistik Perkebunan Indonesia 2001-2003: Kelapa Sawit*. Departemen Pertanian. Jakarta.
4. KARTODIRJO, S dan DJOKO SURJO. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media. Yogyakarta.
5. KETETAPAN-KETETAPAN MPR-RI 1993 termasuk GBHN 1993-1998. 1993. Bumi Aksara. Jakarta.
6. NASUTION, K. 2003. *Kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampak Sosial Ekonominya pada Masyarakat di Kabupaten Kampar Riau*. MM Tesis. IPB. Bogor.